Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development
E-ISSN: 2655-0865
DINASTI RESEARCH
082170743613 ranahresearch@gmail.com https://jurnal.ranahresearch.com

DOI: https://doi.org/10.38035/rrj.v9i1.2350
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 28 Oktober 2026 | **Revised:** 6 November 2026 | **Accepted:** 20 November 2026

Manajemen Makna tidak Terkordinasi antara Roy Suryo dan Joko Widodo

Nur Inayah Yushar[1], Marina Rospitasari[2], Reja Reja[3], Fullah Jumayna[4], Chomariyana Kartika Hesti[5]
[1]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
[2]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
[3]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
[4]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
[5]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: nurinayahyushar@upnvj.ac.id[1]

Abstract: *Public conflicts between political figures often persist despite legal rulings. Studies of the Jokowi diploma controversy focus on linguistic strategies in media coverage, while Coordinated Management of Meaning (CMM) research rarely examines failed meaning coordination between individual political elites; this is the research gap. Its novelty lies in analyzing uncoordinated management of meaning in elite political discourse. It identifies patterns of uncoordinated meaning in the communicative episodes between Roy Suryo and Joko Widodo regarding the alleged fake diploma, examining how divergences across the hierarchy of meaning (content, speech act, episode, relationship, and life script) contribute. Using a qualitative approach, it analyzes mass media documents. Both actors assign divergent meanings to the same events at all levels, most markedly at the episode level, where Roy Suryo sees discrete legal-technical units while Joko Widodo frames one continuous political operation. This produces an unwanted repetitive pattern (URP), an asymmetric confirmation loop that reproduces conflict. It persists because legal mechanisms operate at the content and episode levels, while the core conflict lies in life scripts and cultural patterns, so rulings are absorbed into each party's narrative. The findings are expected to inform conflict-resolution approaches in political communication that address deeper levels of meaning.*

Keyword: *Uncoordinated Management of Meaning, Hierarchy of Meaning, Political Communication, Jokowi Diploma Dispute.*

Abstrak: Konflik publik antarfigur politik kerap berlanjut meskipun ada putusan hukum. Kajian tentang sengketa ijazah Jokowi berfokus pada strategi kebahasaan dalam pemberitaan, sedangkan penelitian Coordinated Management of Meaning (CMM) jarang menelaah kegagalan koordinasi makna antartokoh elite politik; inilah celah penelitiannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis manajemen makna tidak terkoordinasi dalam wacana politik elite. Penelitian ini mengidentifikasi pola ketidakkoordinasian makna (uncoordinated meaning) dalam episode komunikasi antara Roy Suryo dan Jokowi terkait dugaan ijazah palsu, serta

bagaimana perbedaan interpretasi pada level hierarki makna (isi, tindak tutur, episode, hubungan, naskah kehidupan) berkontribusi pada pola tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menelusuri dokumen pemberitaan media massa. Kedua pihak memaknai peristiwa yang sama secara berbeda di seluruh level, paling tajam pada level episode: Roy Suryo memaknainya sebagai unit hukum-teknis terpisah, sedangkan Jokowi sebagai satu operasi politik berkelanjutan. Hal ini membentuk pola berulang yang tidak diinginkan (unwanted repetitive pattern), yakni loop konfirmasi asimetris yang mereproduksi konflik. Pola ini bertahan karena mekanisme hukum beroperasi pada level isi dan episode, sementara akar konflik berada pada naskah kehidupan dan pola budaya, sehingga putusan diserap kembali ke dalam narasi masing-masing pihak. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pendekatan penyelesaian konflik dalam komunikasi politik yang menyentuh level makna lebih dalam.

Kata Kunci: Manajemen Makna Tidak Terkordinasi, Hierarki Makna, Politik, Sengketa Ijazah Jokowi

PENDAHULUAN

Ruang media di Indonesia dewasa ini semakin sering menjadi arena berlangsungnya konflik publik antarfigur yang ditandai oleh rangkaian klaim dan bantahan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Fenomena ini tidak lepas dari kondisi polarisasi politik yang meluas pasca-kontestasi elektoral, di mana media sosial berperan sebagai arena reproduksi konflik sosial akibat perbedaan identitas, kepentingan, dan fragmentasi informasi (Defri Agustina et al., 2026). Polarisasi tersebut diperparah oleh mekanisme algoritmik seperti *echo chamber* dan penyebaran disinformasi, yang mempercepat segregasi opini publik, melemahkan ruang deliberasi, sekaligus menggerus kepercayaan terhadap institusi (Yuwanda Efrianti, 2025). Dalam banyak kasus, konflik semacam ini tidak lagi murni berbasis argumentasi faktual, melainkan telah menjelma menjadi pertarungan naratif antarpihak yang masing-masing berupaya mempertahankan kebenaran versinya sendiri di hadapan publik.

Salah satu kasus yang merepresentasikan fenomena ini secara mencolok adalah perseteruan panjang antara Roy Suryo dan Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu. Isu ini pertama kali mengemuka di ruang publik pada 2019 melalui unggahan warganet, kemudian berkembang lintas tahun dengan melibatkan berbagai pihak, sebelum akhirnya memuncak menjadi proses hukum aktif sejak pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Sepanjang proses tersebut, kasus ini telah melalui sejumlah tahap investigasi forensik dan putusan pengadilan, termasuk pernyataan resmi Universitas Gadjah Mada dan hasil audit dokumen oleh kepolisian yang menyatakan ijazah tersebut asli, namun perdebatan publik tidak kunjung mereda. Bahkan, sebuah kajian atas pemberitaan kasus ini menemukan bahwa meskipun sebagian besar klaim hoaks terkait telah dibantah oleh pemeriksa fakta, opini publik tetap terbelah akibat pengaruh disinformasi digital, pembingkaian media, dan rendahnya literasi arsip serta hukum di masyarakat (Aldi Sajian & Ardan Alif, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara penyelesaian secara faktual-hukum dan realitas komunikasi publik yang terus menghasilkan makna-makna yang saling bertentangan, sebuah gejala yang mengindikasikan bahwa akar persoalan bukan lagi terletak pada ketersediaan fakta, melainkan pada bagaimana fakta tersebut dimaknai secara berbeda oleh pihak-pihak yang berseteru.

Kasus ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena setidaknya tiga karakteristik yang membedakannya dari konflik publik pada umumnya. Pertama, perseteruan ini melibatkan dua figur dengan kekuatan naratif yang tidak setara. Di satu sisi, Roy Suryo tampil sebagai aktor yang sangat vokal dan aktif memproduksi narasi, hadir berulang kali di berbagai program media, memberikan pernyataan langsung kepada pers, serta menggunakan identitasnya sebagai pengamat/mantan pejabat untuk memperkuat klaim keahliannya dalam menilai keaslian

dokumen. Di sisi lain, Joko Widodo sebagai mantan presiden cenderung merespons secara terbatas dan formal, umumnya melalui tim kuasa hukum atau pernyataan resmi yang singkat, alih-alih terlibat langsung dalam pertukaran wacana di ruang publik.

Kedua, konflik ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dan berlapis, bukan sebagai insiden tunggal. Sejak isu ini pertama kali muncul di ruang publik hingga bergulir menjadi proses hukum aktif, meliputi pelaporan, penetapan tersangka, penangkapan, serta rangkaian praperadilan yang berulang kali diajukan, kasus ini telah melewati berbagai titik yang semestinya berpotensi menjadi momen penyelesaian, namun pada kenyataannya justru masing-masing menjadi episode baru yang memperpanjang pertentangan. Karakteristik ini menjadikan kasus ini unit analisis yang kaya bagi pendekatan berbasis episode seperti CMM, karena memungkinkan penelusuran pola ketidakkoordinasian makna yang berkembang dan bertransformasi dari waktu ke waktu, bukan sekadar potret sesaat dari satu peristiwa.

Ketiga, dan yang paling relevan secara teoretis, konflik ini terus menghasilkan narasi yang saling bertentangan meskipun telah melalui proses hukum berulang kali. Setiap putusan pengadilan, baik penghentian penyelidikan, hasil audit forensik yang menyatakan dokumen asli, maupun putusan praperadilan yang berulang kali menolak permohonan pemohon, semestinya berfungsi sebagai otoritas yang menutup perdebatan faktual. Namun pada praktiknya, setiap putusan tersebut justru dimaknai secara berbeda oleh masing-masing pihak: satu pihak memaknainya sebagai penegasan kebenaran versinya, sementara pihak lain memaknainya sebagai bukti adanya rekayasa atau intervensi kekuasaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis pola ketidakkoordinasian makna (uncoordinated meaning) terbentuk dalam episode komunikasi antara Roy Suryo dan Jokowi terkait kasus dugaan ijazah palsu, ditinjau dari hierarki makna Coordinated Management of Meaning (CMM).

Penelitian terdahulu mengenai kasus ijazah Jokowi telah banyak menyoroti strategi kebahasaan (eufemisme, framing, wacana kritis) dalam pemberitaan media (Qabliah & Salam, 2025; Rosita et al., 2025; Tangkudung et al., 2026), namun belum ada yang menganalisis secara spesifik bagaimana kedua pihak yang berseteru, Roy Suryo dan Joko Widodo, memaknai peristiwa yang sama secara berbeda pada level-level makna yang berlapis (dari isi hingga pola budaya). Selain itu, Penelitian terdahulu mengenai Coordinated Management of Meaning (CMM) mayoritas berfokus pada keberhasilan koordinasi makna dalam hubungan interpersonal privat (Pranawukir et al., 2024; Sinulingga & Adhani, 2026), organisasi Perusahaan (Kapege & Munawir, 2026; Koch, 2026), maupun koalisi politik untuk membentuk branding Bersama (Putri & Prasetyo, 2024). Adapun studi mengenai kegagalan koordinasi makna umumnya berada pada ranah diplomasi makro antarnegara (Hampsey, 2025).

Penelitian ini mengisi kebaruan dengan meneliti manajemen makna tidak terkoordinasi (uncoordinated management of meaning) pada tingkat wacana politik elit antartokoh individual di ruang publik, menelusuri secara spesifik bagaimana kedua aktor yang berkonflik dengan cara memaknai peristiwa yang sama secara berbeda pada level-level makna yang berlapis, dari isi pesan literal hingga pola budaya yang melatarinya.



Figure 1. Hierarki Makna

Konsep **ketidakkoordinasian makna (*uncoordinated meaning*)** menjadi kunci untuk membaca kasus Roy Suryo dan Joko Widodo. Ketidakkoordinasian terjadi ketika kedua pihak memaknai tindakan atau pernyataan yang identik secara berbeda, dan perbedaan tersebut tidak disadari atau tidak pernah dikonfirmasi ulang oleh kedua pihak, sehingga masing-masing terus merespons berdasarkan peta maknanya sendiri. Asumsi inti CMM adalah bahwa manusia tidak sekadar merespons realitas yang sudah ada, melainkan turut menciptakan realitas sosial tersebut melalui proses saling memaknai tindakan satu sama lain, sehingga konflik yang berkepanjangan dapat dipahami sebagai kegagalan dua pihak dalam mengoordinasikan makna mereka, bukan semata perbedaan pendapat atas fakta yang sama (Pearce & Cronen, 1980).

Dengan demikian, ketidaktuntasan konflik antara Roy Suryo dan Jokowi meski telah melalui audit forensik dan putusan pengadilan berulang kali dapat dibaca bukan sebagai kegagalan sistem hukum semata, melainkan sebagai indikasi adanya ketidakkoordinasian makna yang berlangsung di tingkat komunikasi personal maupun publik antara kedua pihak, sebuah fenomena yang justru menjadi objek kajian utama CMM, dan menjadikannya kerangka teori yang tepat untuk membedah kasus ini secara lebih mendalam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif-konstruktivis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berupaya memahami dan mendeskripsikan bagaimana makna dikonstruksi, dinegosiasikan, dan sering kali gagal dikoordinasikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah interaksi komunikasi. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder (11 pemberitaan media massa dan dokumen publik), dengan rentang waktu pengumpulan data sejak 2013 hingga September 2026. Sumber data ini didasarkan pada media massa yang memberi konteks, memparafrasekan, atau melaporkan pernyataan dan tindakan kedua pihak

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti empat tahap yang dirancang khusus untuk mengoperasionalkan hierarki makna CMM (Pearce & Cronen, 1980).

a) Tahap Pertama, Segmentasi Episode. Data yang telah terkumpul dikelompokkan ke dalam episode-episode komunikasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Episode 1 hingga Episode 5, sebagaimana disusun dalam kerangka episode penelitian), dengan batasan waktu dan peristiwa yang jelas pada setiap episode untuk menjaga konsistensi unit analisis.
b) Tahap kedua, Koding Hierarki Makna. Setiap unit data dikodekan ke dalam enam tingkat hierarki makna CMM: isi, tindak tutur, episode, hubungan (kontrak), naskah kehidupan (autobiografi), dan pola budaya, secara terpisah untuk masing-masing pihak yang berkonflik. Proses koding ini menghasilkan dua "peta makna" per episode: satu dari perspektif Roy Suryo, satu dari perspektif Jokowi/kuasa hukumnya, sebagaimana dituangkan dalam instrumen coding sheet penelitian.
c) Tahap Ketiga, Identifikasi Titik Divergensi. Kedua peta makna pada setiap episode dibandingkan secara sistematis untuk mengidentifikasi titik-titik ketidakkoordinasian, dengan perhatian khusus pada divergensi lintas-tingkat, yaitu ketika satu pihak memaknai suatu tindakan pada satu tingkat (misalnya tindak tutur), sementara pihak lain meresponsnya pada tingkat yang berbeda (misalnya hubungan atau naskah kehidupan). Temuan pada tahap ini dicatat dalam kolom catatan divergensi pada instrumen coding.
d) Tahap Keempat, Interpretasi Pola Berulang. Pola-pola divergensi yang teridentifikasi di seluruh episode kemudian dianalisis secara lintas-kasus (cross-episode analysis) untuk menemukan pola berulang (unwanted repetitive pattern) serta menelusuri pola budaya yang menjadi rujukan tak terucap dari masing-masing pihak, sebagai basis interpretasi pada tingkat tertinggi hierarki makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Segmentasi Episode

Isu ijazah palsu ini pertama kali dilontarkan bukan oleh Roy Suryo, melainkan oleh seorang warganet bernama Umar Kholid Harahap lewat Facebook pada 2019, yang menuding Jokowi memakai ijazah SMA palsu saat mendaftar capres.Orang pertama yang menghembuskan isu tersebut adalah Umar Kholid Harahap melalui akun Facebook miliknya pada tahun 2019, dengan narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu ketika mendaftar sebagai calon presiden. Isu ini lalu diteruskan sejumlah tokoh lain sebelum akhirnya diangkat Roy Suryo (Lintang, 2026). Menurut penuturan Roy Suryo sendiri, pemicu spesifik yang mendorong penelusuran lebih lanjut adalah candaan Jokowi di sebuah acara bersama Mahfud MD pada 2013, tentang dirinya bisa lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dengan IPK di bawah 2,0. Setelah candaan itu ramai, Dekan Fakultas Kehutanan UGM merilis fotokopi ijazah Jokowi, namun langkah ini justru memicu semakin banyak pertanyaan publik soal keabsahannya, termasuk soal skripsi (Poerwoto, 2025).

Rismon Hasiholan Sianipar, ahli forensik digital, kemudian meneliti langsung skripsi Jokowi di UGM dan mengklaim menemukan kejanggalan hingga menyebut skripsi tersebut palsu, ini titik eskalasi dari sekadar isu ijazah ke isu keaslian karya akademik (Poerwoto, 2025).

Sempat ada penyelidikan resmi kepolisian atas laporan-laporan awal ini. Bareskrim Polri akhirnya memutuskan menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukan unsur tindak pidana, secara hukum ini semestinya menutup isu, tapi kenyataannya tidak meredam narasi public (Meliana, 2025). Pada awal 2025, giliran Roy Suryo mempersoalkan kejanggalan pada fotokopi ijazah sarjana Jokowi dari UGM, bersama dr. Tifa dan Rismon Sianipar. Tim penyidik sempat mengaudit dokumen, dan Polri kembali menyatakan ijazah tersebut asli sehingga investigasi dihentikan lagi (Harto, 2026).

Inilah yang jadi pemicu langsung perseteruan personal: pada 30 April 2025, Jokowi bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan balik tuduhan ijazah palsu tersebut, jadi Jokowi berposisi sebagai pelapor, bukan terlapor pertama. Pada 7 Juli 2025, Roy Suryo bersama Eggi Sudjana dan pengacaranya dimintai keterangan pertama kali oleh polisi terkait laporan Jokowi, diikuti panggilan lanjutan pada 21 Juli 2025. Prosesnya berlanjut hingga Roy Suryo resmi menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada 13 November 2025, bersama dr. Tifa dan Rismon Sianipar (Azzahra & Febiola, 2025).

Struktur Hierarki Makna

Berdasarkan kerangka episode yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan struktur ketidakkordinasian makna menggunakan level CMM, sebagai berikut:

Pada level isi (*content*), akan menganalisis fakta pesan literal yang disampaikan, yaitu klaim faktual masing-masing pihak. Disatu sisi, pihak Roy Suryo mengklaim ijazah ini janggal secara forensik, sedangkan disisi lain pihak Joko Widodo mengklaim ijazah ini sah dan terverifikasi KPU.

Selanjutnya, pada level tindak tutur (*speech act*) akan menganalisis tindakan yang dilakukan lewat ucapan, apakah pernyataan diatas dimaknai sebagai tuduhan dan fitnah, atau tantangan untuk klarifikasi. Disatu sisi, pihak Roy Suryo klaim ijazah palsu sebagai tuntutan keadilan. Namun disisi lain pihak Joko Widodo memaknai klaim ijazah palsu sebagai provokasi.

Selanjutnya, pada level episode (*episodes*) akan menganalisis rangkaian tindak tutur yang membentuk satu peristiwa bermakna. Berikut kronologis episode perseteruan tudingan ijazah palsu yang terbangun dari level tindak tutur:

Tabel 1. Linimasa Perseteruan Tudingan Ijazah Palsu

Fase	Periode	Peristiwa
Isu Awal dan Pemicu	2013	Jokowi berkelakar dalam suatu acara bersama Mahfud MD bahwa dirinya bisa lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dengan IPK di bawah 2,0. Candaan

Fase	Periode	Peristiwa
Perseteruan		ini belakangan disebut sebagai pemicu awal penelusuran publik atas ijazahnya (Suzatri, 2025).
	2019	Umar Kholid Harahap mengunggah narasi di Facebook yang mengklaim Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu saat mendaftar sebagai calon presiden, klaim publik pertama yang tercatat soal isu ini (Mays, 2019)
	April 2025	Dekan Fakultas Kehutanan UGM merilis fotokopi ijazah Jokowi untuk merespons pertanyaan publik; langkah ini justru memicu makin banyak analisis dan pertanyaan soal keabsahan dokumen, termasuk soal skripsi (Official iNews, 2025).
Pemicu Langsung Perseteruan	April 2025	Roy Suryo, bersama dr. Tifa dan Rismon Sianipar, kembali mempersoalkan kejanggalan pada fotokopi ijazah sarjana Jokowi dari UGM. Tim penyidik mengaudit dokumen yang disampaikan (Keidenesia.tv, 2025).
	30 April 2025	Jokowi bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan lima orang, termasuk Roy Suryo, dr. Tifa, dan Rismon Sianipar, atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu (CNN Indonesia, 2025)
	22 Mei 2025	Polri menyatakan ijazah Jokowi asli; penyelidikan atas laporan soal dugaan pemalsuan ijazah dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana (detik.com, 2025).
Penangkapan & Rentetan Pra Peradilan	19 Juni 2026	Roy Suryo dan dr. Tifa (Tifauziah Tyassuma) ditangkap oleh Polda Metro Jaya, sekitar 8 bulan setelah penetapan tersangka dan sekitar 2 minggu setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejati DKI Jakarta (Metro Siang, 2026) .
	Juli 2026	Putusan praperadilan: hakim mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo, menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan oleh Polda Metro Jaya tidak sah (detik.com, 2026)
Sidang Pokok Perkara Dimulai	2026	Roy Suryo secara terbuka menantang Jokowi untuk hadir langsung (bukan hanya diwakili kuasa hukum) dalam sidang pokok perkara (iNews, 2026).
	2026	Sidang pokok perkara perdana digelar di PN Jakarta Timur dengan agenda pembacaan dakwaan JPU terhadap Roy Suryo (Pasal 433/441 KUHP jo. UU ITE tentang pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen pribadi). Jokowi tidak hadir; pada hari yang sama ia mengunjungi warga korban gempa di NTT (Kompas TV, 2026) .

Selanjutnya, pada level hubungan (*relationship*) akan menganalisis kesepakatan implisit tentang siapa yang berhak terhadap apa, dalam relasi ini. Pada level ini, masing-masing memosisikan relasi kekuasaan. Disatu sisi, pihak Roy Suryo memosisikan diri sebagai warga negara yang berhak atas informasi public, terutama informasi terkait ijazah dari pemimpin negara, dan diwaktu yang bersamaan pihak Roy Suryo juga memosisikan pihak Joko Widodo sebagai mantan presiden yang harus akuntabel dan terbuka soal ijazah pendidikannya. Sedangkan disisi lain, pihak Joko Widodo memosisikan diri sebagai korban fitnah dan memosisikan pihak Roy Suryo sebagai penyebar Hoaks.

Selanjutnya, pada level naskah kehidupan (*life scripts*) akan menganalisis narasi diri jangka panjang yang dibawa ke interaksi ini. Pada level ini, kedua belah pihak masing-masing hadir membawa identitas yang dipertaruhkan. Disatu sisi Roy Suryo hadir sebagai pakar telematika/pengungkap kebenaran" yang konsisten sejak kasus-kasus sebelumnya. Sedangkan Disisi lain Jokowi hadir dengan identitas sebagai "presiden yang integritasnya diserang terus-menerus".

Pada level terakhir, terdapat level pola budaya (*cultural pattern*), berisikan nilai atau asumsi budaya-politik yang lebih luas yang melatari semua level-level diatas. Level ini menunjukkan wacana besar yang menjadi rujukan. Disatu sisi, sikap Roy Suryo yang menginginkan pembuktian keaslian ijazah Joko Widodo secara terbuka, mencerminkan pola budaya kebebasan berpendapat dan memandang pembuktian ijazah palsu sebagai pengawasan publik terhadap elite. Sedangkan disisi lain, sikap dari pihak Joko Widodo yang merasa klaim ijazah palsu adalah tuduhan dan fitnah, serta menolak pembuktian secara publik,mencerminkan pola budaya ‘perlindungan martabat pejabat negara’.

Identifikasi Titik Divergensi

Bagian ini menyajikan perbandingan peta makna Roy Suryo dan Joko Widodo pada Hierarki CMM, identifikasi titik divergensi makna antara Roy Suryo dan Joko Widodo, disusun berdasarkan enam tingkat hierarki makna Coordinated Management of Meaning (CMM): isi (*content*), tindak tutur (*speech act*), episode, hubungan (*relationship*), naskah kehidupan (*life script*), dan pola budaya (*cultural pattern*). Berdasarkan analisis terhadap enam tingkat hierarki makna Coordinated Management of Meaning (CMM) di seluruh episode konflik, ditemukan pola divergensi yang konsisten antara Roy Suryo dan Joko Widodo, mulai dari tingkat paling dasar (isi pesan) hingga tingkat paling abstrak (pola budaya).

Pada tingkat isi (*content*), kedua pihak secara konsisten memproduksi klaim dan bukti yang bersifat faktual untuk memperkuat posisinya masing-masing. Roy Suryo secara berulang menghadirkan bukti teknis-forensik, mulai dari fotokopi ijazah, analisis kejanggalan skripsi, hingga dokumen dari KPU, sebagai basis untuk terus mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Di sisi lain, Jokowi secara konsisten menghadirkan bukti tandingan yang bersifat institusional, seperti konfirmasi resmi dari UGM dan hasil audit Polri, sekaligus klaim personal bahwa ia memegang ijazah asli dan siap menunjukkannya di pengadilan. Menariknya, meskipun kedua pihak sama-sama memproduksi "bukti faktual", tidak satu pun bukti dari salah satu pihak pernah dianggap dispositif atau final oleh pihak lain. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi bukti dalam konflik ini bukanlah untuk menyelesaikan sengketa, melainkan untuk menegaskan ulang posisi masing-masing pihak.

Pada tingkat tindak tutur (*speech acts*), teridentifikasi pola yang asimetris antara kedua pihak. Roy Suryo menunjukkan pola tindak tutur yang inisiatif, personal, dan frekuentif, ia berulang kali menuduh, menginvestigasi, dan menantang secara langsung. Sebaliknya, Jokowi menunjukkan pola tindak tutur yang lebih reaktif, institusional, dan jarang dilakukan secara langsung, sebagian besar responsnya disampaikan melalui kuasa hukum, dengan pernyataan personal yang hanya muncul sesekali, terutama dalam satu wawancara besar pada Desember 2025. Ketimpangan tempo dan level partisipasi ini menunjukkan bahwa kedua pihak secara struktural tidak pernah "berbicara" pada tempo dan level yang setara.

Pada tingkat episode, ditemukan perbedaan pemaknaan yang paling signifikan dalam keseluruhan analisis. Roy Suryo memaknai rangkaian panjang peristiwa sebagai serangkaian episode hukum-teknis yang terpisah satu sama lain, setiap laporan, penangkapan, dan praperadilan dipandang sebagai unit kemenangan atau kekalahan tersendiri. Sementara itu, Jokowi memaknai keseluruhan rangkaian tersebut sebagai satu episode politik besar yang berkesinambungan, sebagaimana secara eksplisit ia rujuk sebagai "agenda besar politik" dan "operasi politik". Perbedaan skala pembingkaian peristiwa ini, antara kerangka mikro-hukum dan makro-politik, menjadikan kedua pihak sebenarnya tidak pernah membicarakan "peristiwa yang sama" dalam unit analisis yang sama, dan inilah yang menjadi akar struktural dari ketidakkoordinasian makna dalam kasus ini.

Pada tingkat hubungan (*relationship*), kedua pihak memosisikan diri mereka berdasarkan klaim hak yang secara struktural saling berlawanan. Roy Suryo memosisikan dirinya sebagai pengawas publik yang berhak menguji dan mempertanyakan pejabat atau mantan pejabat negara tanpa batas waktu maupun jumlah upaya hukum. Sebaliknya, Jokowi memosisikan dirinya sebagai warga negara yang berhak atas kepastian hukum serta perlindungan dari tuduhan yang terus berulang selama bertahun-tahun. Tidak satu pun dari kedua pihak yang mengakui batas normatif yang diklaim sebagai sah oleh pihak lain, sehingga relasi kontraktual di antara keduanya tidak pernah benar-benar dinegosiasikan ulang.

Pada tingkat naskah kehidupan (*life scripts*), ditemukan pola yang secara tidak langsung justru melanggengkan konflik itu sendiri. Roy Suryo membangun narasi diri sebagai "pengawas atau pejuang independen yang gigih", yang diperkuat oleh setiap tindakan aparat yang dapat ia bingkai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap dirinya. Sementara itu, Jokowi membangun narasi diri sebagai "pemimpin yang terus difitnah meski telah berulang kali diklarifikasi",

namun tetap sabar menghormati proses hukum sembari menjalankan kewajiban kenegaraan dan kemanusiaannya. Yang menarik, kedua narasi diri ini justru saling menguatkan melalui berlanjutnya konflik itu sendiri, identitas masing-masing pihak semakin dipertegas oleh sengketa yang terus berjalan, sehingga secara tidak sadar terdapat insentif naratif bagi kedua pihak untuk tidak menyelesaikan konflik ini secara tuntas.

Terakhir, pada tingkat pola budaya (*cultural pattern*), kedua pihak secara konsisten merujuk pada dua kerangka wacana besar yang secara struktural saling meniadakan legitimasi satu sama lain. Roy Suryo merujuk pada wacana akuntabilitas publik, transparansi elite, dan penolakan terhadap kriminalisasi suara kritis. Sebaliknya, Jokowi merujuk pada wacana supremasi hukum, operasi politik terselubung di balik isu yang terus-menerus didaur ulang, serta kenegarawanan dan kepastian hukum sebagai penangkal disinformasi politik. Sepanjang enam episode yang dianalisis, tidak ditemukan satu pun titik temu antara kedua kerangka wacana ini, yang mengindikasikan bahwa ketidakkoordinasian makna pada tingkat tertinggi hierarki CMM ini bersifat struktural dan ideologis, bukan sekadar situasional atau sesaat.

Titik divergensi atau perbedaan makna pada tiap tingkatan hierarki menunjukkan bahwa tiap pihak merasa responsnya masuk akal, tapi justru memperburuk konflik. Dengan kata lain, pihak yang berkomunikasi terjebak dalam siklus tindakan-respons yang terus mereproduksi konflik yang sama, alih-alih bergerak menuju penyelesaian, meskipun kedua pihak secara individual mungkin tidak menginginkan kelanjutan konflik tersebut.

Interpretasi Pola Berulang

Pearce dan Cronen (1980) membedakan dua tipe aturan yang mengoordinasikan makna: aturan konstitutif (*constitutive rules*), yang menentukan bagaimana suatu perilaku diinterpretasikan maknanya, dan aturan regulatif (*regulative rules*), yang menentukan urutan tindakan apa yang akan dilakukan seseorang selanjutnya. Ketika dua pihak menjalankan sistem aturan konstitutif dan regulatif yang berbeda namun sama-sama meyakini bahwa mereka "harus" bertindak sesuai sistem masing-masing, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, kondisi ini berpotensi menjerumuskan keduanya ke dalam pola berulang yang tidak diinginkan (*unwanted repetitive patterns*,URP): episode konflik yang berurutan dan terjadi berulang kali, yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Pada tahap sebelumnya, menunjukkan bahwa Roy Suryo dan Jokowi menjalankan sistem aturan yang secara struktural berlawanan. Aturan konstitutif Roy Suryo menginterpretasikan setiap kejanggalan dokumen sebagai indikasi pemalsuan yang wajib ditindaklanjuti, sehingga aturan regulatifnya secara konsisten mengarah pada urutan tindakan: mempertanyakan ulang → mencari bukti tambahan → menempuh upaya hukum baru ketika upaya sebelumnya ditolak.

Sebaliknya, aturan konstitutif Jokowi menginterpretasikan tuduhan berulang tersebut sebagai fitnah yang sudah terklarifikasi institusi berwenang, sehingga aturan regulatifnya mengarah pada urutan tindakan yang berbeda: menyerahkan pada proses hukum formal → menunggu putusan → menganggap perkara selesai secara hukum begitu putusan diperoleh. Karena kedua sistem aturan ini tidak pernah dinegosiasikan ulang secara bersama, setiap putaran proses hukum yang semestinya menjadi titik selesai bagi satu pihak justru menjadi titik awal baru bagi pihak lain,pola yang berulang inilah yang teridentifikasi konsisten sejak awal.

Pearce (1980) mencatat bahwa individu yang terjebak URP sering kali secara jujur menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertindak sesuai sistem aturan yang mereka yakini. Merujuk pada tiga kondisi yang mendasari bertahannya URP menurut kerangka ini, dapat ditarik interpretasi berikut untuk kasus ini:

a) **Tidak melihat adanya pilihan lain.** Aturan konstitutif Roy Suryo , bahwa kejanggalan dokumen publik wajib dipertanyakan seorang pengawas , membuat setiap penolakan praperadilan dimaknai bukan sebagai sinyal untuk berhenti, melainkan sebagai dorongan untuk menempuh jalur berikutnya, karena berhenti akan bertentangan dengan aturan

konstitutif yang menjadi fondasi identitasnya.

b) **Kenyamanan dengan pola konflik yang telah dikenali.** Karena konflik ini telah berlangsung sejak 2019, kedua pihak sudah sangat memahami gaya komunikasi dan pola respons satu sama lain , Roy Suryo tahu responsnya akan dijawab secara institusional, Jokowi tahu tuduhan tersebut akan datang kembali dalam bentuk baru. Prediktabilitas pola ini, alih-alih mendorong penyelesaian, justru dapat membuat pola tersebut menjadi rutinitas yang "dikenal" dan karenanya lebih mudah dijalani ulang daripada diputus.

c) **Kelelahan mengupayakan resolusi.** Indikasi paling dekat dengan kondisi ini adalah pernyataan Jokowi dalam wawancara Desember 2025 bahwa ia telah "diam empat tahun" (KompasTV, 2025) sebelum akhirnya menempuh jalur hukum, mengisyaratkan bahwa opsi non-konfrontatif (diam) telah dicoba lebih dulu dan dianggap tidak memadai, sehingga tersisa jalur formal sebagai satu-satunya pilihan yang dianggap tuntas, meski pada praktiknya juga tidak mengakhiri pola.

Temuan ketidakcocokan makna dan kesenjangan tingkat upaya penyelesaian konflik dalam penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas kerangka Coordinated Management of Meaning (Pearce & Cronen, 1980). Jika CMM klasik umumnya diterapkan pada relasi interpersonal yang relatif setara, kasus Roy Suryo–Jokowi menunjukkan bahwa unwanted repetitive pattern tetap terbentuk bahkan pada relasi dengan asimetri kekuatan naratif yang besar,mantan presiden versus pengamat publik. Ini mengindikasikan URP bukan sekadar produk kesalahpahaman timbal balik yang setara, melainkan dapat muncul dari dua strategi komunikasi yang berbeda: satu pihak aktif-personal, satu pihak reaktif-institusional.

Temuan ini juga melengkapi penelitian terdahulu. Jika Qabliah dan Salam (202 (KompasTV, 2025)5) menemukan media membingkai isu ini lewat eufemisme, penelitian ini menunjukkan pembingkaian tersebut berakar pada perbedaan mendasar dalam memaknai skala episode kedua aktor sendiri,bukan sekadar pilihan gaya bahasa jurnalistik. Demikian pula, jika Rosita (2025) berhenti pada analisis struktur wacana teks berita, penelitian ini menjangkau proses interaksional di baliknya: bagaimana makna gagal dikoordinasikan dari waktu ke waktu antaraktor yang berkonflik.

Secara teoretis, konsep loop konfirmasi asimetris dapat diajukan sebagai varian URP yang khas pada konflik dengan ketimpangan akses media. Secara praktis, temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian hukum formal,yang beroperasi di tingkat isi dan episode,tidak otomatis menyelesaikan pertentangan makna yang berakar di tingkat naskah kehidupan dan pola budaya; intervensi komunikasi publik perlu menyasar tingkat yang lebih tinggi tersebut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan: desain studi kasus tunggal membatasi generalisasi, data bersumber sekunder tanpa wawancara langsung, dan kasus masih berjalan saat penelitian ditulis. Penelitian selanjutnya disarankan menempuh pendekatan longitudinal pasca-putusan akhir atau studi komparatif pada kasus serupa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis ketidakkoordinasian makna dalam perseteruan tudingan ijazah palsu antara Roy Suryo dan Joko Widodo menggunakan kerangka Coordinated Management of Meaning (CMM). Hasil analisis terhadap enam episode menunjukkan bahwa kedua pihak secara konsisten memaknai peristiwa yang sama secara berbeda di seluruh tingkat hierarki makna,mulai dari isi pesan hingga pola budaya,dengan divergensi paling signifikan terjadi pada tingkat episode, di mana Roy Suryo memaknai rangkaian peristiwa sebagai unit hukum-teknis terpisah, sementara Jokowi memaknainya sebagai satu operasi politik berkelanjutan.

Ketidakkoordinasian ini membentuk pola berulang yang tidak diinginkan (unwanted repetitive pattern), sebuah loop konfirmasi asimetris yang terus mereproduksi konflik alih-alih menyelesaikannya. Pola ini bertahan karena mekanisme penyelesaian formal (proses hukum)

beroperasi di tingkat isi dan episode, sementara akar konflik yang sesungguhnya berada pada tingkat naskah kehidupan dan pola budaya yang jauh lebih tinggi,sehingga setiap putusan hukum yang dihasilkan selalu diserap kembali ke dalam narasi masing-masing pihak, bukan mengubahnya. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian hukum formal tidak serta-merta menyelesaikan pertentangan makna di ruang publik, sekaligus memperluas penerapan CMM pada konflik dengan asimetri kekuatan naratif yang besar, sebuah konteks yang belum banyak dijamah penelitian CMM sebelumnya di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada desain studi kasus tunggal, ketergantungan pada data sekunder, serta sifat kasus yang masih berjalan saat penelitian ditulis. Penelitian selanjutnya disarankan menempuh pendekatan longitudinal pasca-putusan akhir kasus ini, atau studi komparatif pada konflik figur publik lain dengan karakteristik asimetri naratif serupa, guna menguji sejauh mana pola loop konfirmasi asimetris ini berlaku secara lebih luas.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan pendekatan kualitatif longitudinal pasca-putusan berkekuatan hukum tetap *(inkracht),* guna melihat dekonstruksi atau re-negosiasi narasi akhir. Selain itu, kajian lanjutan dapat memperluas metode dengan *multimodal discourse analysis* pada interaksi digital atau wawancara mendalam terhadap lingkaran naratif kedua belah pihak. Penelitian komparatif juga diperlukan pada kasus konflik figur publik lain dengan karakter asimetri modal naratif serupa untuk memvalidasi generalisasi model konseptual loop konfirmasi asimetris.

Kontribusi Author

Penulis pertama bertanggung jawab untuk menyusun konseptualisasi (Conceptualization), perumusan masalah, koordinasi pengumpulan data sekunder, serta penulisan draf awal naskah *(Writing – original draft)*.

Penulis kedua bertugas untuk melakukan pengembangan kerangka teoretis *Coordinated Management of Meaning (CMM),* supervisi metodologi dan coding hierarki makna *(Methodology & Validation),* analisis pola berulang (URP), serta telaah kritis dan penyuntingan naskah *(Writing – review & editing)*.

Penulis ketiga memiliki tugas untuk pengumpulan dokumen pemberitaan media massa, segmentasi data linimasa episode *(Data curation & Investigation),* dan pembuatan tabel linimasa.

Penulis keempat bertugas untuk melakukan analisis data tingkat tindak tutur *(speech act)* dan isi *(content),* penyusunan lembar koding *(formal analysis),* serta penelusuran referensi.

Penulis kelima bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi konsistensi temuan divergensi, penyuntingan format naskah sesuai pedoman jurnal *(Visualization & Project administration),* serta penyiapan bibliografi.

Pernyataan Pengungkapan AI

Selama penyusunan karya ini, penulis menggunakan teknologi AI generatif semata-mata untuk membantu penerjemahan bahasa (abstrak akademik dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris) dan penyempurnaan tata bahasa pada bagian-bagian tertentu. Penulis telah menelaah serta menyunting hasil keluaran tersebut secara menyeluruh, dan bertanggung jawab penuh atas isi, integritas akademik, interpretasi, serta kesimpulan yang disajikan dalam publikasi ini. Alat AI tidak digunakan untuk menghasilkan, memfabrikasi, atau memanipulasi data penelitian primer/sekunder, maupun untuk menulis analisis teoretis utama.

Acknowlegment (Opsional)

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pembangunan Nasional

"Veteran" Jakarta atas dukungan akademis dan fasilitas institusional yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi rekan-rekan akademisi sejawat yang telah memberikan masukan, kritik, dan diskusi yang konstruktif dalam penyempurnaan aplikasi teori Coordinated Management of Meaning pada kajian komunikasi politik ini.

REFERENSI

Aldi Sajian, & Ardan Alif. (2025). Struktur dan Konflik Sosial: Perspektif Teori Sosiologi terhadap Polarisasi di Era Media Sosial. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *4*(1), 309–314. https://doi.org/10.55681/seikat.v4i1.1632

Azzahra, N., & Febiola, A. (2025, November 14). *Kasus Ijazah Jokowi: Alur Laporan hingga Roy Suryo Jadi Tersangka*. Tempo.Com. https://www.tempo.co/hukum/kasus-ijazah-jokowi-alur-laporan-hingga-roy-suryo-jadi-tersangka-2089445

CNN Indonesia. (2025, April 30). *Jokowi Laporkan 5 Orang Pencemaran Nama Baik & Fitnah soal Ijazah*. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250430140006-12-1224322/jokowi-laporkan-5-orang-pencemaran-nama-baik-fitnah-soal-ijazah

Defri Agustina, A., Andre Wijaya, H., Attalah, F., Santoso, R., Syariah, F., & Raden Intan Lampung, U. (2026). REKONSTRUKSI POLITIK UNTUK MENGANALISIS POLARISASI DAN GANGGUAN DEMOKRASI DI MEDIA SOSIAL INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *4*(2), 7–16. https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik

detik.com. (2025, May 22). *Tak Ada Unsur Pidana, Bareskrim Setop Penyelidikan Isu Ijazah Palsu Jokowi*. Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-7926767/tak-ada-unsur-pidana-bareskrim-setop-penyelidikan-isu-ijazah-palsu-jokowi

detik.com. (2026, July 7). *Hakim Kabulkan Sebagian Gugatan Praperadilan Roy Suryo*. Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-8563438/hakim-kabulkan-sebagian-gugatan-praperadilan-roy-suryo

Hampsey, R. (2025). *Coordinated Management of Meaning in U.S.-Russia Relations: How Meanings Shaped Communication Surrounding the Potential Invasion of Ukraine*.

Harto, A. (2026, June 19). *Jalan Berliku Kasus Tudingan Ijazah Jokowi*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/artikel/jalan-berliku-kasus-tudingan-ijazah-jokowi

iNews. (2026, September 3). *BABAK AKHIR ROY SURYO, IJASAH JOKOWI TERUNGKAP? | Interupsi*. Official INews. https://www.youtube.com/watch?v=P3jP-3xBOf4

Kapege, L. A., & Munawir. (2026). Negosiasi Makna dalam Penyelesaian Konflik Interdepartemental: Studi Kasus Komunikasi Organisasi di PT Hania Natura Indonesia. *JIKSP: Jurnal Ilmu Komunikasi & Sosial Politik*, *04*(01), 140–144. https://doi.org/10.62379/jiksp.v4i1.5083

Keidenesia.tv. (2025). *Roy Suryo dan Dokter Tifa Ungkap Kejanggalan, UGM: Joko Widodo Alumnus UGM*. Keidenesia.Tv. https://keidenesia.tv/roy-suryo-dan-dokter-tifa-ungkap-kejanggalan-ugm-joko-widodo-alumnus-ugm/

Koch, T. J. (2026). *A Qualitative Interpretive Study of How a Trucking Company Coordinates the Management of Meanings of its Communications in the United States of America*.

Kompas TV. (2026, September 17). *Sidang Perdana Roy Suryo Kasus Ijazah Jokowi di PN Jaktim, Begini Dakwaan JPU*. Kompas TV. Sidang Perdana Roy Suryo Kasus Ijazah Jokowi di PN Jaktim, Begini Dakwaan JPU

Lintang, I. (2026, June 22). *Kronologi Lengkap Kasus Ijazah Jokowi hingga Roy Suryo Ditangkap*. Inilah.Com. https://www.inilah.com/roy-suryo-ditangkap-polda-metro-jaya-ini-kronologi-lengkap-kasus-ijazah-jokowi

Mays. (2019, January 20). *Sebar Hoaks Ijazah Palsu Jokowi, Umar Kholid Terancam 3 Tahun Penjara*. Rakyatku.Com/. https://rakyatku.com/read/136260/sebar-hoaks-ijazah-palsu-jokowi-umar-kholid-terancam-3-tahun-penjara

Meliana, R. (2025, December 18). *Bagaimana Awal Mula Ijazah Jokowi Dituduh Palsu?* Suara.Com. https://www.suara.com/lifestyle/2025/12/18/191757/bagaimana-awal-mula-ijazah-jokowi-dituduh-palsu

Metro Siang. (2026). *Polda Metro Jaya Jelaskan Penangkapan Roy Suryo & Dokter Tifa*. Metro TV. https://www.youtube.com/watch?v=WpXeq7ML8RM

Official iNews. (2025, April 16). *UGM Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Lulus Fakultas Kehutanan Tahun 1985*. Youtube.Com/c/OfficialiNews . https://www.youtube.com/shorts/BfIUnJCBBBs

Pearce, W. B., & Cronen, V. E. (1980). *Communication, Action, and Meaning: The Creation of Cocial Realities*. Praeger Publisher.

Poerwoto, Y. L. (2025, May 18). *Awal Mula Jokowi Dilaporkan soal Kasus Ijazah Disebut karena Candaannya 12 Tahun Lalu, Apa Itu?* Tribunnews.Com. https://www.tribunnews.com/nasional/2025/05/18/awal-mula-jokowi-dilaporkan-soal-kasus-ijazah-disebut-karena-candaannya-12-tahun-lalu-apa-itu

Pranawukir, I., Sukma, A. H., Misnan, Alamsyah, & Putri, E. R. (2024). Manajemen Makna Terkoordinasi Pada Proses Komunikasi Interpersonal Dalam Bimbingan Skripsi Prodi Ilmu Komunikasi. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *7*(1), 35–44. https://doi.org/10.33021/exp.v7i1.5559

Putri, E. T. W., & Prasetyo, B. D. (2024). Coordinated Meaning Management In The Successful Reconstruction of The New Identity Negotiations of The Anies-Muhaimin Pair In The 2024 General Election In Sidoarjo District. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *6*(5). https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5

Qabliah, I., & Salam, N. A. (2025). PENGGUNAAN EUFEMISME DALAM BERITA ONLINE DUGAAN IJAZAH PALSU JOKOWI PADA MEDIA TRIBUN TIMUR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(2), 303–314.

Rosita, F. Y., Rakhmawati, A., & Saddhono, K. (2025). POLITICAL NARRATIVE ABOUT THE FAKE DIPLOMA CONTROVERSY ON AN ONLINE NEWS PORTAL Narasi Politik dalam Pemberitaan Kontroversi Ijazah Palsu di Portal Berita Daring. *Jurnal Akasara*, *37*(2), 490–502. https://doi.org/10.29255/aksara.v37i2.4568.490-503

Sinulingga, E. S., & Adhani, A. (2026). Silent Treatment in Husband-Wife Interpersonal Communication: Analysis of Meaning, Conflict, and Relational Construction Through CMM Theory. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, *7*(2), 184. https://doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.26027

Suzatri, A. (2025, May 26). *Ini Guyonan Jokowi Soal IPK di Bawah 2 Bisa Lulus UGM, Picu Ijazah dan Transkrip Nilai Diragukan*. Sumsel.Tribunnews.Com/. https://sumsel.tribunnews.com/2025/05/26/ini-guyonan-jokowi-soal-ipk-di-bawah-2-bisa-lulus-ugm-picu-ijazah-dan-transkrip-nilai-diragukan

Tangkudung, A. G. D., Kaseger, J. Y., & Sagay, R. (2026). Political Conflict in the Digital Age: The Relationship Between President Joko Widodo and the “Jokowi Haters” Group Amid the Controversy Over the Fake Diploma Issue. *Interdisciplinary Social Studies*, *5*(4), 1287–1297.

Yuwanda Efrianti. (2025). Polarisasi Politik Indonesia Tahun 2024 dalam Pemberitaan Media Online. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, *3*(1), 74–91. https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v3i1.4869